

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali didukung oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata saat ini. Hal ini didukung oleh beragamnya budaya yang dimiliki salah satunya mengenai adat istiadat yang lahir dari masing-masing wilayah. Pemerintah daerah tentunya memiliki otonomi daerah yang berhak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk pengelolaan kekayaan desa. Menurut Sadiartha (2017:2), secara umum, kebijakan pembangunan pedesaan dapat dipilah menjadi tiga kelompok. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar suasana yang mendukung tercapainya kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada kegiatan sosial ekonomi kelompok sasaran, seperti halnya sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, kebijakan khusus yang menyangkut masyarakat melalui upaya khusus, dengan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi menginisiasikan suatu lembaga keuangan tingkat desa yang dapat membangun dan mengelola perekonomian dari tingkat desa.

Dalam membangun perekonomian pedesaan, Pemerintah Provinsi Bali Tingkat I mendirikan suatu lembaga keuangan pedesaan yang saat ini disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD ini dioperasikan disetiap *desa pakraman*

di Bali. *Desa pakraman* atau lazim pula disebut desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, *kahyangan tiga* atau pura lain yang memiliki peranan yang sama dengan *kahyangan tiga*, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan pemerintahan adat dengan kepengurusannya (Atmadja: 2011:02). Pengoprasian LPD disetiap *desa pakraman* telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman* (batas daerah suatu desa). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini telah beroperasi di setiap *desa pakraman* di Bali dan dipergunakan untuk penitipan maupun penukaran uang di suatu desa. Menurut Made Mertha dan Budhiarta (dalam Mardiana, dkk, 2014:02) dengan semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, desa adat memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari pengaruh buruk pesatnya pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, tujuan pendirian LPD ini adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Selain itu, LPD juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi

perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali. Selanjutnya peranan LPD ini semakin terus berkembang, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi perekonomian. Karena LPD merupakan lembaga yang dinamis, maka LPD mampu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Sehingga usaha LPD bukan saja sebagai penyimpanan dan pemberian kredit, tetapi juga sebagai alat lalu lintas pembayaran, stabilitas dan pembayaran, stabilitas dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu desa. Berikut disajikan mengenai data statistik perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Nomor	Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan							Tenaga Kerja	Asset	Laba
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Laport	Baru Operasional			
1	GROKGAH	14	8	4	1	1	-	-	-	112	Rp 636.360.278	Rp 10.724.106
2	SERIRIT	25	14	5	1	2	1	-	-	95	Rp 80.845.763	Rp 2.449.007
3	BUSUNG BIU	16	6	2	2	-	6	-	-	43	Rp 79.872.056	Rp 2.854.341
4	BANJAR	17	7	3	1	-	5	-	1	40	Rp 37.023.478	Rp 1.705.402
5	SUKASADA	21	16	4	-	1	1	-	-	115	Rp 210.537.887	Rp 6.164.764
6	BULELENG	21	12	3	2	-	3	-	-	146	Rp 572.515.080	Rp 12.807.223
7	SAWAN	18	12	2	3	-	1	-	-	86	Rp 106.962.825	Rp 4.229.566
8	KUBUTAMBAHAN	22	12	3	4	-	3	-	-	85	Rp 109.596.438	Rp 4.144.226
9	TEJAKULA	15	12	2	1	-	-	-	-	92	Rp 276.690.746	Rp 10.955.904
	JUMLAH	169	99	28	15	4	20	-	1	814	Rp 2.110.404.551	Rp 56.034.539

(Tabel 1. Data statistik perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018)
 Sumber : <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/bankdata/data-perkembangan-lpd-di-kabupaten-buleleng-tahun-2018-11>)

Berdasarkan data perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 menggambarkan bahwa dari 169 LPD yang terdaftar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buleleng hanya 99 LPD yang memiliki kondisi sehat, 28 LPD

memiliki kondisi cukup sehat, 15 LPD memiliki kondisi kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat dan 20 LPD dinyatakan macet. Kondisi ini juga akan menjadi masalah yang besar bagi keberlangsungan LPD kedepannya. Kunci dari keberlangsungan LPD di masing-masing *desa pakraman* adalah adanya kepercayaan dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakatnya sendiri sudah tidak percaya dengan pengelolaan LPDnya maka tidak akan ada keberlangsungan kedepannya hingga LPD tersebut pailit. Hal ini terbukti dengan banyaknya LPD di Bali yang mengalami kepailitan karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakatnya. Untuk terus mendapatkan kepercayaan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan LPD.

Fahmi (2012:2) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Kinerja keuangan suatu LPD dapat dilihat dari laporan keuangan bulanan, tiga bulanan atau per tahunnya. Kinerja keuangan ini harus diukur setiap tahunnya untuk mengetahui prestasi keuntungan yang didapat pada tahun tersebut. Dari data diatas menggambarkan kinerja keuangan LPD Kabupaten Buleleng sangat beragam, yang mana pengelolaan aset yang paling besar berada pada Kecamatan Buleleng sebesar Rp 572.515.080.000 dengan jumlah laba sebesar Rp 12.807.223.000. sedangkan, pengelolaan aset yang paling kecil berada pada Kecamatan Banjar sebesar Rp 37.013.478.000 dengan jumlah laba sebesar Rp 1.705.402. Hal ini berarti kinerja keuangan diartikan sebagai prestasi ataupun kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan data diatas, pengelolaan aset dan perolehan laba yang paling kecil berada pada Kecamatan Banjar. Melihat hal tersebut LPD di Kecamatan Banjar menarik untuk diteliti mengenai kinerja keuangannya. Selain itu, banyaknya isu dari masyarakat yang meragukan tingkat kesehatan LPD khususnya di desa *Pakraman* Kaliasem. Mengingat bahwa pada tahun 2018 berdasarkan data statistis perkembangan LPD di Kecamatan Banjar, pengelolaan asset dan labanya yang masih kecil dari semua kecamatan yang ada di Buleleng. Untuk itu, dipilihlah LPD Desa Kaliasem yang beralamat di Jalan Anak Agung Pandji Tisna, Banjar Dinas Lebah *Desa Pakraman* Kaliasem, Kecamatan Banjar untuk melihat kinerja keuangan di LPD desa tersebut. Selain itu, LPD *desa pakraman* ini memiliki keberlangsungan yang lama yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LPD ini sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kaliasem.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kinerja keuangan pada LPD *Desa Pakraman* Kaliasem?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas adalah untuk mengetahui kinerja keuangan LPD *Desa Pakraman* Kaliasem.

1.4. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah kedalam dunia kerja, mengetahui situasi dan keadaan didunia kerja khususnya di Lembaga perekonomian yang ada didesa, serta diperolehnya tambahan pengetahuan khusus mengenai analisis kinerja keuangan pada lembaga perekonomian desa salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di *Desa Pakraman* Kaliasem.

3. LPD *Desa Pakraman* Kaliasem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat *Desa Kaliasem* terhadap tingkat kesehatan LPD *Desa Kaliasem*, dan bahan evaluasi yang nantinya digunakan untuk menilai kinerja keuangan dalam oprasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa Pakraman Kalisem*.